

BAB IV

UPAYA KELOMPOK KEPENTINGAN DALAM LEGALISASI KEBIJAKAN PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI AMERIKA SERIKAT

Kemunculan komunitas LGBT di Amerika Serikat tentu saja melahirkan berbagai macam kelompok kepentingan yang bergerak dalam isu tersebut. Pada bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang adanya kemunculan organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam mewadahi komunitas LGBT baik dengan skala regional maupun skala nasional. Bab ini akan dibagi menjadi beberapa subbab. Di subbab yang pertama akan membicarakan tentang kelompok kepentingan LGBT yang akhirnya melahirkan beberapa *non-governmental organization* (NGO) yang bergerak di bidang LGBT. Kemudian di subbab selanjutnya akan dijabarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh NGO dalam mempengaruhi pemerintah untuk melegalkan pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat serta motivasi dibalik upaya tersebut. Pada subbab terakhir akan dijelaskan tentang pengesahan pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat dengan skala nasional pada tahun 2015.

A. Kemunculan dan Perkembangan Kelompok Kepentingan LGBT di Amerika Serikat

Salah satu organisasi non-pemerintah LGBT pertama di Amerika Serikat adalah Mattachine Society (Kaczorowski, 2004). Kelompok ini didirikan pada tahun 1951 oleh seorang aktivis LGBT bernama Henry Hay dan didirikan di Los Angeles, California (Springate, 2016).

Tidak hanya Mattachine Society – yang lebih terfokus pada kelompok *gay* – muncul juga sebuah kelompok yang memfokuskan kelompok mereka kepada kelompok *lesbian*. Kelompok tersebut adalah Daughter of Bilitis yang dibentuk beberapa tahun setelah Mattachine Society dan dibentuk di San Francisco, California (Richards, 2014). Setelah kemunculan

Mattachine Society di Los Angeles dan Daughter of Bilitis di San Francisco, mulai muncul beberapa organisasi-organisasi yang juga mendukung pergerakan LGBT di Amerika Serikat. Pada pertengahan tahun 1950-an, organisasi-organisasi kecil ini terbentuk di beberapa kota besar di Amerika Serikat, di antaranya New York, Chicago, San Francisco, dan Los Angeles (Richards, 2014).

Perkumpulan orang-orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai penyuka sesama jenis ini berawal dari berkumpulnya mereka di satu tempat. Tempat berkumpul yang paling sering mereka datangi adalah *gay bar* dan keberadaan *gay bar* tersebut menjadi sebuah hal yang penting bagi berkumpulnya komunitas LGBT. Dengan adanya *gay bar* menjadi sebuah simbol bagi komunitas LGBT untuk bertahan di lingkungan yang banyak menolak keberadaan komunitas LGBT. Tidak hanya *gay bar*, namun tempat-tempat lain yang menjadi institusi sosial komunitas LGBT antara lain restoran dan kelab malam yang memiliki tema LGBT (SurveyLA, 2014).

Seiring dengan berjalannya waktu, mulai muncul banyak sekali kelompok-kelompok LGBT di Amerika Serikat yang bergerak demi membela keberadaan komunitas LGBT. Kelompok-kelompok tersebut bergerak dari skala regional, kemudian mereka juga bergerak di pada skala negara bagian, hingga bergerak pada skala nasional, bahkan internasional. Pergerakan mereka bergerak pada skala spasial dikarenakan dianggap lebih efektif dalam meraih tujuan yang dikehendaki oleh kelompok tersebut. sehingga mereka mampu untuk membuat beberapa penyesuaian tentang strategi-strategi yang akan mereka laksanakan demi mencapai tujuan yang diinginkan (Smitton, 2017). Maka dari itu, tidak sedikit pula organisasi LGBT di Amerika Serikat yang bergerak pada skala nasional. Ada beberapa organisasi LGBT besar dan bergerak pada skala nasional yang cukup berpengaruh di Amerika Serikat. Pengaruh yang mereka lakukan juga mampu mempengaruhi pemerintah

Amerika Serikat untuk segera melegalkan pernikahan sesama jenis pada skala nasional. Organisasi besar LGBT yang memiliki pengaruh cukup besar dalam legalisasi pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat antara lain:

1) *Human Rights Campaign (HRC)*



Gambar 6 Logo Human Rights Campaign (Human Rights Campaign, 2015)

Human Rights Campaign atau HRC merupakan sebuah organisasi LGBT yang anggota dan pendukung sebesar 3 (tiga) juta orang di seluruh penjuru Amerika Serikat. Organisasi ini memastikan bahwa komunitas LGBT mendapatkan hak-hak kesetaraan dasar yang mereka butuhkan. Mereka juga memastikan bahwa komunitas LGBT mampu terbuka, jujur, dan merasa aman saat berada di rumah, tempat kerja, bahkan di masyarakat (Human Rights Campaign, 2015).

Organisasi ini didirikan pada tahun 1980 oleh Steve Endean. Keberadaan HRC ini menjadikan organisasi ini sebagai komite aksi politik gay dan lesbian pertama di Amerika Serikat. Misi dari didirikannya organisasi ini adalah untuk mendukung calon-calon legislatif yang memiliki orientasi seksual

baik sebagai gay maupun lesbian. Kemudian, pada tahun 1995, misi mereka diubah untuk tidak hanya bergerak di bidang politik saja, namun mereka juga membuat beberapa program lainnya, seperti *Workplace Project and the Family Project* yang lebih memperhatikan pada sisi pendidikan (Human Rights Campaign, 2015).

Pendukung dari organisasi ini tidak hanya datang dari masyarakat biasa. Banyak pendukung dari tokoh-tokoh yang cukup berpengaruh di Amerika Serikat juga ikut berpartisipasi sebagai pendukung organisasi ini. Beberapa tokoh tersebut antara lain aktor George Clooney, CEO dari Apple Tim Cook, penyanyi Lady Gaga, aktris Anne Hathaway, penyanyi Jennifer Hudson, seorang transgender dari klan Kardashian-Jenner Caitlyn Jenner, seorang penyanyi legendaris Elton John, dan masih banyak lagi (Human Rights Campaign, 2015).

Tidak hanya dukungan dari tokoh-tokoh terkenal di Amerika Serikat, HRC juga bekerja sama dengan beberapa korporasi-korporasi besar yang bahkan sudah terkenal sampai di dunia internasional. Korporasi yang bekerja sama dengan HRC juga mencakup berbagai bidang, mulai dari bidang aviasi hingga bidang teknologi. Beberapa korporasi tersebut antara lain American Airlines, Apple, The Coca-Cola Company, Intel, Microsoft, Target, UPS, Accenture, Diageo Smirnoff, Chevron, Lexus, Nike, Prudential, Google, Alaska Airlines, Mastercard, Amazon, Dell, The Hershey Company, dan korporasi-korporasi lainnya. Bentuk dukungan yang diberikan oleh korporasi-korporasi di atas adalah memberikan bantuan berupa dana serta komitmen mereka terhadap memperjuangkan kesetaraan bagi komunitas LGBT (Human Rights Campaign, 2015).

Kantor permanen HRC pertama kali didirikan pada tahun 2003 di Washington, D.C. Pendirian

gedung kantor HRC ini dianggap sebagai pengingat bagi komunitas-komunitas yang menentang LGBT bahwa HRC akan terus memperjuangkan hak-hak kesetaraan bagi komunitas LGBT (Human Rights Campaign, 2015).

Selain itu, HRC merupakan salah satu organisasi LGBT yang cukup berpengaruh terhadap legalisasi pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat pada 2015. Hal tersebut dikarenakan salah satu anggota dari HRC, Jim Obergefell, merupakan salah satu penggugat di Mahkamah Agung tentang belum dilegalkannya pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat (Human Rights Campaign, 2015).

Selain berkerja di kawasan Amerika Serikat, HRC juga bekerja sampai ke dunia internasional. Mereka membentuk sebuah jaringan yang mereka sebut sebagai *HRC Global Innovative* dan *HRC Global Fellows*. Mereka adalah cabang-cabang HRC dari berbagai belahan dunia. Di antaranya adalah Nicaragua, Mozambique, Filipina, Irlandia, Kyrgyzstan, Myanmar, Uruguay, dan Turki (Human Rights Campaign, 2018). Mereka juga membuka kesempatan bagi organisasi-organisasi dari berbagai negara di seluruh dunia yang ingin bergabung dengan jaringan tersebut. HRC juga akan mendatangi negara yang bersangkutan dan membantu untuk mengedukasi organisasi LGBT yang berada di negara tersebut (Human Rights Campaign, 2018).

2) *GLBTQ Legal Advocates & Defenders (GLAD)*



Gambar 7 Logo GLAD (GLAD, 2018)

Organisasi lainnya adalah *GLBTQ Legal Advocates & Defenders* atau yang lebih sering dikenal sebagai GLAD. Organisasi ini didirikan pada tahun 1978 di Boston, Massachusetts oleh seorang pengacara muda bernama John Ward. GLAD didirikan ketika sebuah organisasi anti-LGBT yang didirikan oleh Anita Bryant sedang ramai diperbincangkan (GLAD, 2018).

Tujuan didirikannya GLAD ini adalah berjuang demi keadilan bagi komunitas LGBT dan terjauh dari diskriminasi. Diskriminasi yang dimaksud adalah tidak hanya untuk komunitas LGBT, namun juga identitas gender dan orang-orang yang terkena HIV. Berbeda dengan HRC maupun PFLAG yang lebih bertujuan untuk mengedukasi tentang komunitas LGBT kepada masyarakat luas, namun GLAD di sini lebih membantu dan atau menuntun komunitas LGBT untuk mengatasi masalah yang terkait dengan LGBT melalui advokasi (GLAD, 2018).

Selain itu, sudah banyak kasus-kasus yang ditangani oleh GLAD dalam memperjuangkan keadilan bagi komunitas LGBT. Kasus-kasus yang ditangani antara lain tentang diskriminasi, *employment*, HIV/AIDS, hak-hak transgender, anak-

anak muda yang tergabung dalam komunitas LGBT, dan tentu saja pernikahan (GLAD, 2018).

Salah satu kasus yang pernah ditangani oleh GLAD adalah kasus pernikahan sesama jenis di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. *GLAD Civil Rights Project Director*, Mary L. Bonauto mendesak Mahkamah Agung pada 28 April 2015 agar menghapus kebijakan di beberapa negara bagian yang masih melarang pernikahan sesama jenis. GLAD juga menjadi pembantu penasihat di beberapa kasus pernikahan sesama jenis. Di antaranya, *DeBoer v. Snyder* di Michigan, kemudian ada juga kasus *Love v. Beshear* (dikenal juga sebagai *Bourke v. Beshear*) di Kentucky (GLAD, 2108).

Jika HRC melakukan kerja sama dengan korporasi-korporasi besar demi menyokong finansial mereka, GLAD tidak menunjukkan dengan gamblang dari mana mereka mendapatkan dukungan secara finansial. Hanya saja, terdapat sebuah laporan keuangan yang menunjukkan bahwa sumber dana yang didapatkan adalah dari penggalangan dana serta donasi yang diberikan kepada organisasi ini (GLAD, 2018)

3) *Lambda Legal*



Gambar 8 Logo Lambda Legal (Lambda Legal, 2015)

Organisasi lainnya yang bergerak dalam memperjuangkan kesetaraan bagi komunitas LGBT adalah *Lambda Legal*. Organisasi ini didirikan pada tahun 1973 oleh Bill Thom (Lambda Legal, 2015). Organisasi yang sebelumnya bernama Band-Aid ini mendedikasikan organisasi ini untuk mendapatkan kesetaraan seutuhnya bagi komunitas LGBT (Impact, 2008).

Lambda Legal memfokuskan kinerja mereka dalam advokasi, dan juga mengedukasi siapapun yang berada di komunitas LGBT. Baik lesbian, gay, transgender, biseksual, bahkan sampai mereka yang mengidap HIV akan dibantu oleh organisasi ini. (Lambda Legal, 2015). Salah satu bentuk kerja nyata yang berhasil dilakukan oleh *Lambda Legal* adalah kasus diskriminasi atas sebuah keluarga yang menjadi bagian dari komunitas LGBT. Mereka menggugat *U.S. Department of Health and Human Services* karena dianggap mendiskriminasi komunitas LGBT. Mereka protes langsung kepada *U.S. District Court for the District of Columbia* di tahun 2018 (Lambda Legal, 2015).

Kemudian, *Lambda Legal* juga memiliki salah satu program untuk mengedukasi anak-anak muda yang menjadi bagian dari komunitas LGBT.

Mereka bahkan menyediakan sebuah *platform* untuk mengedukasi anak-anak muda tentang bagaimana dinamika komunitas LGBT khususnya di Amerika Serikat (Lambda Legal, 2018).

Selain itu, *Lambda Legal* juga ikut perjuangan dalam pelegalan pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat. Bentuk dukungan yang dilakukan oleh organisasi non-profit ini adalah bekerja sama dengan organisasi lokal bernama *Equality California* serta sebuah organisasi yang dikhususkan untuk lesbian, *National Center for Lesbian Rights*. Bentuk kerja sama yang mereka lakukan adalah mereka melakukan sebuah upaya untuk mengedukasi serta mengampanyekan *freedom to marry* (Freedom to Marry, 2016).

4) *Freedom to Marry*



Gambar 9 Logo Freedom to Marry (Freedom to Marry, 2016)

Organisasi lainnya yang terfokus pada komunitas LGBT lainnya adalah *Freedom to Marry*. Organisasi ini dicetuskan oleh seorang pengacara bernama Evan Wolfson pada tahun 2003 di New York City (Freedom to Marry, 2016). Tujuan utama didirikannya organisasi ini adalah mendesak pemerintah agar bias melegalkan pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat (Heller, Karen, 2015).

Organisasi ini pun mengumpulkan dukungannya dari masyarakat. Membuat sebuah *polling* untuk mengetahui seberapa besar dukungan masyarakat terhadap isu pelegalan pernikahan sesama jenis. Kemudian, dari hasil *polling* tersebut, organisasi ini akan meningkatkan kapasitas gerakannya agar dapat mendapatkan dukungan dari masyarakat serta membangun opini publik tentang pernikahan sesama jenis (Freedom to Marry, 2015).

Tidak hanya masyarakat saja yang mendukung keberadaan organisasi ini, namun *Freedom to Marry* mampu memperoleh dukungan bipartisan dari kedua partai politik besar di Amerika Serikat. Meskipun Partai Republik di Amerika Serikat memang terkenal dengan sifat konservatifnya, namun, semenjak meledaknya isu pernikahan sesama jenis di awal era 2000-an, komunitas LGBT mulai berusaha untuk membujuk dan mendapatkan dukungan terhadap orang-orang konservatif dan juga Partai Republik. Sampai akhirnya, *Freedom to Marry* pun mendapatkan dukungan dari kedua partai politik, Partai Republik dan Partai Demokrat (Freedom to Marry, 2015).

Setelah organisasi ini mendapatkan dukungan yang dikira cukup untuk melanjutkan kampanyenya, *Freedom to Marry* pun memulai pergerakannya melalui tingkatan negara bagian terlebih dahulu. Menurut mereka, tidak harus langsung dalam skala nasional. Namun, mereka menyatakan bahwa mereka harus memenangkan berbagai macam kasus pernikahan sesama jenis di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Kampanye yang dilakukan oleh *Freedom to Marry* pada tingkat negara bagian juga dibantu oleh organisasi-organisasi LGBT local yang berada di negara bagian yang sedang menjadi target selanjutnya (Freedom to Marry, 2015).

Berbeda dengan HRC yang bekerja sama dengan korporasi-korporasi demi mendapatkan dukungan secara finansial, *Freedom to Marry* mendanai kampanyenya dengan membuka donasi kepada siapapun yang bersedia untuk berdonasi. Meskipun tidak bekerja sama dengan korporasi-korporasi besar, namun mereka juga mendapatkan donasi yang cukup besar dari beberapa korporasi. Di antaranya ada *The Ford Foundation* dan *SKYY Vodka*. Tidak hanya itu, mereka juga membuka donasi secara daring di *website* mereka. Bahkan total donasi yang didapatkan pada tahun 2014 mencapai angka 12 juta dollar (*Freedom to Marry*, 2015).

B. Kelanjutan Upaya Pelegalan Pernikahan Sesama Jenis di Seluruh Amerika Serikat Sebagai Sebuah Pembentukan Norma Baru

Setelah berjuang dengan mengubah stigma masyarakat tentang keberadaan komunitas LGBT, tentu saja orang-orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari komunitas LGBT juga ingin memperjuangkan haknya untuk menikah. Hal tersebut terlihat dari perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi LGBT di atas. Mereka berjuang sedemikian rupa agar pemerintah Amerika Serikat bersedia untuk melegalkan pernikahan sesama jenis dalam skala nasional. Peran organisasi LGBT serta beberapa kampanye tentang pelegalan pernikahan sesama jenis cukup penting karena mereka terus saja menyuarakan keinginan mereka untuk bisa menikah dengan pasangan mereka seperti pasangan heteroseksual pada umumnya.

Di Amerika Serikat, pernikahan yang dipandang sah secara hukum adalah pernikahan antara pasangan laki-laki dan perempuan. Hanya

saja, sejak pertengahan abad ke-20, seiring dengan berkembangnya komunitas LGBT, isu pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat semakin ramai diperbincangkan (Erickson, 2015). Kemudian pada tahun 2004, Massachusetts melegalkan pernikahan sesama jenis dan menjadikan Massachusetts sebagai negara bagian pertama di Amerika Serikat yang melegalkan pernikahan sesama jenis (Bonauto & Wolfson, 2009).

Komunitas LGBT juga berusaha untuk mengubah *Defense Against Marriage Act* (DOMA) yang merupakan sebuah undang-undang tentang pernikahan di Amerika Serikat dan disahkan pada tahun 1996. Pada undang-undang yang dimaksud, pernikahan hanya diajukan untuk pasangan heteroseksual, yakni pasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada hukum atau pasal yang menyatakan bahwa pasangan sesama jenis diperbolehkan untuk menikah. Pada akhirnya, pasangan-pasangan sesama jenis tersebut mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung di masing-masing negara bagian (Sommer, 2015). Kemudian muncul sebuah pertanyaan dari Mahkamah Agung terkait pernikahan sesama jenis tersebut:

“Does the Fourteenth Amendment require a state to recognize a marriage between two people of the same sex when their marriage was lawfully licensed and performed out of state?” (Supreme Court of the United States, 2015)

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh komunitas LGBT dalam pelegalan pernikahan sesama jenis adalah:

1) *Mendapatkan Dukungan dari Masyarakat*

Dukungan masyarakat untuk pelegalan pernikahan sesama jenis dianggap sangat penting bagi komunitas LGBT. Hal tersebut dikarenakan opini publik ikut membantu bagaimana sebuah kebijakan dibentuk (Flores, Andrew R.; Barclay, Scott, 2016). Berbagai organisasi LGBT besar di Amerika Serikat berlomba-lomba untuk mendapatkan dukungan masyarakat dengan berbagai macam cara. Seperti mengadakan pengambilan suara atau melakukan tanda tangan demi menunjukkan dukungannya terhadap pelegalan pernikahan sesama jenis. Seperti pada tahun 2015, *Human Rights Campaign* berusaha untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan mengumpulkan tanda tangan yang menyatakan bahwa mereka mendukung pernikahan sesama jenis dan seharusnya kebijakan tersebut dilegalkan tidak hanya di beberapa negara bagian, namun di seluruh penjuru Amerika Serikat. Akhirnya, sebanyak 207.551 tanda tangan dari seluruh negara bagian menyatakan bahwa mereka mendukung komunitas LGBT untuk mendapatkan hak menikah dalam skala nasional (The People's Brief, 2015).

Tidak hanya HRC yang mencari dukungan dari masyarakat, organisasi LGBT lainnya juga ikut mencari dukungan terkait pelegalan pernikahan sesama jenis. Berbeda dengan HRC yang mengumpulkan tanda tangan masyarakat demi menunjukkan dukungan pelegalan pernikahan sesama jenis, *Freedom to Marry* lebih kepada melakukan survey tentang masyarakat yang mendukung pernikahan sesama jenis. Data yang dibagikan oleh *Freedom to Marry* menyatakan bahwa ada 58% dari masyarakat Amerika Serikat yang

mendukung pelegalan pernikahan sesama jenis di tahun 2018. Presentase tersebut meningkat sejak tahun 2004 – 2013. Perolehan data tersebut diambil dari berbagai macam latar belakang yang ada di masyarakat, seperti *Africans*, *Americans*, *Latinos*, *Republicans/Conservatives*, Umat Katolik, dan bahkan *Evangelicals*. Hal tersebut dilakukan demi menunjukkan dukungan yang menyeluruh bagi komunitas LGBT (*Freedom to Marry*, 2015).

Freedom to Marry juga tidak hanya melakukan survey terhadap masyarakat Amerika Serikat yang mendukung pernikahan sesama jenis, mereka juga membuat sebuah program kerja untuk mengedukasi masyarakat tentang pernikahan sesama jenis. Sehingga, dengan dibentuknya program kerja tersebut, mereka dapat mendapatkan dukungan dari masyarakat tentang pelegalan pernikahan sesama jenis. Program tersebut adalah *Why Marriage Matters*. Program ini berbentuk kampanye dalam skala nasional dan *Freedom to Marry* juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain demi menjalankan kampanye ini (*Freedom to Marry*, 2015).

2) *Kerja sama antar Organisasi LGBT*

Pelegalan pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat tidak jauh dari peran organisasi-organisasi LGBT yang bersatu demi mendesak pemerintah Amerika Serikat agar melegalkan pernikahan sesama jenis. Kerja sama antar organisasi ini mereka lakukan tidak langsung pada skala nasional. Namun, mereka bekerja pada tingkat negara bagian dan berusaha untuk mempengaruhi Mahkamah

Agung setempat agar melegalkan pernikahan sesama jenis dalam tingkat negara bagian. Organisasi-organisasi itu antara lain the *American Civil Liberties Union (ACLU)*, *GLBTQ Legal Advocates & Defenders (GLAD)*, *Lambda Legal*, dan *the National Center for Lesbian Rights (Freedom to Marry, 2016)*.

Negara-negara bagian yang menjadi target mereka adalah New England, yang mencakup Vermont, Maine, dan New Hampshire. Mereka berusaha untuk memperoleh legislasi dan tanda tangan dari gubernur setempat. Kemudian tidak hanya wilayah New England, namun juga Iowa dan Washington D.C. juga melakukan hal yang sama dengan New England sehingga adanya legalisasi pernikahan sesama jenis di negara bagian tersebut. Kemudian pada bulan Mei 2009, Rob Reiner yang didukung oleh Chad Griffin dan seorang *screenwriter* Dustin Lance Black dan juga mantan pengacara George W. Bush, Jend. Ted Olson dan pengacara partai Demokrat, David Boies, membuat sebuah penggalangan dana bernama *American Foundation for Equal Rights* demi mendesak Mahkamah Agung Amerika Serikat terhadap pernikahan sesama jenis. (Freedom to Marry, 2016).

Tidak hanya itu, GLAD juga ikut melakukan *lobbying* dan advokasi di beberapa negara bagian, di antaranya adalah Massachusetts – yang kemudian menjadi negara bagian pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Kemudian, ada Connecticut di tahun 2008 dan di New England. Karena New England dianggap

sebagai dasar dalam advokasi dan legislatif terhadap pernikahan sesama jenis. Pada akhirnya, New Hampshire melegalkan pernikahan sesama jenis di tahun 2009 (GLAD, 2015).

3) *Pembentukan Koalisi Antar Negara Bagian*

Setelah kerja sama antar organisasi LGBT terlaksanakan, mereka kemudian berusaha untuk mulai mempengaruhi Mahkamah Agung di beberapa negara bagian. Massachusetts, sebagai negara bagian pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis, kemudian memicu reaksi negara-negara bagian lainnya untuk juga melegalkan pernikahan sesama jenis. Banyak pasangan-pasangan sesama jenis di berbagai negara kemudian ingin juga pernikahan sesama jenis dilegalkan di negara bagian mereka. Karena, hukum yang berlaku di Massachusetts adalah jika ingin menikah di Massachusetts, maka mereka juga harus menjadi warga Massachusetts setelah menikah (Abraham, 2004).

Kemudian pada bulan Mei 2008, Mahkamah Agung California mulai melegalkan pernikahan sesama jenis. Lima bulan setelah pelegalan pernikahan sesama jenis di California, Mahkamah Agung Connecticut juga melegalkan pernikahan sesama jenis. Pelegalan tersebut tidak berjalan dengan sendirinya. Namun, di balik pelegalan kebijakan tersebut ada organisasi LGBT yang

memperjuangkan kepentingan komunitas LGBT. Salah satu yang paling vokal dalam pergerakan tersebut adalah GLAD (Bonauto & Wolfson, 2009).

Kemudian di tahun 2009, *Freedom to Marry* membentuk sebuah model koalisi dengan komunitas LGBT lokal di New York yang membantu dasar-dasar bagaimana kampanye mereka bisa berpengaruh khususnya untuk pemerintah negara bagian. Mereka bekerja sama dengan komunitas LGBT lokal dikarenakan, mereka jauh lebih kuat di tingkat negara bagian karena mereka sudah memahami tentang *lawmakers*, aktivis, *allies*, dan media. Sehingga akan lebih mudah dalam proses pelegalan pernikahan sesama jenis di negara bagian yang dimaksudkan (Freedom to Marry, 2016).

Koalisi antar negara bagian ini dilakukan dengan cara mengajukan gugatan kepada mahkamah agung setempat. Pada bulan Januari 2015, ada 6 (enam) gugatan dari beberapa negara bagian yang dilayangkan kepada Mahkamah Agung yang kemudian ditentukan oleh 6th *Circuit Court of Appeals*. Gugatan-gugatan tersebut adalah:

- Kentucky: *Bourke v. Beshear* dan *Love v. Beshear* yang diajukan oleh *American Civil Liberties Union (ACLU)* dan penasihat
- Michigan: *DeBoer v. Snyder* yang diajukan oleh *GLBTQ Legal Advocates and Defenders (GLAD)* dan penasihat
- Ohio: *Henry v. Hodges*, yang diajukan oleh Lambda Legal dan Firma Gerhardstein & Branch.

- Kemudian ada *Obergefell v. Hodges* yang diajukan oleh ACLU dan Gerhardstein & Branch
- Tennessee: *Tanco v. (Denniston, 2015)Haslam*, yang diajukan oleh *National Center for Lesbian Rights* dan penasihat (Sommer, 2015).

Dari gugatan-gugatan di atas, kasus di Ohio, Henry dan Obergefell, dianggap menunjukkan kepentingan terhadap pernikahan sesama jenis dan juga kasus *Obergefell v. Hodges* merupakan kasus yang akhirnya menjadi tonggak sejarah terhadap pelegalan pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat. Karena, ketika kasus ini disahkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, menjadi penanda bahwa pernikahan sesama jenis sudah legal di seluruh negara bagian setelah sebelumnya hanya legal di 36 negara bagian (Denniston, 2015).

C. Pelegalan Pernikahan Sesama Jenis di Seluruh Amerika Serikat

Legalisasi pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat terjadi pada 26 Juni 2015, setelah sejak 28 April 2015 kasus tersebut diperbincangkan (Supreme Court of the United States, 2015). Kebijakan ini disahkan setelah mendapatkan suara 5 (lima) banding 4 (empat) dari hakim Mahkamah Agung yang menangani kasus ini (Denniston, 2015). Setelah dilaksanakannya pengesahan pernikahan sesama jenis, Mahkamah Agung mewajibkan seluruh negara bagian serta daerah yurisdiksi Amerika Serikat untuk mengeluarkan izin untuk menikah bagi pasangan sesama jenis.

Hal tersebut tertuang pada Amandemen ke-14 dari *Defense of Marriage Act*.

“The Fourteenth Amendment requires a State to license a marriage between two people of the same sex and to recognize a marriage between two people of the same sex when their marriage was lawfully licensed and performed out-of-State.” (Supreme Court of the United States, 2015)

Pelegalan pernikahan sesama jenis tersebut juga tidak lepas dari Presiden Amerika Serikat pada masa itu, Barack Obama. Beliau menyatakan dukungannya terhadap pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat. Meskipun sebelumnya, Obama tidak mendukung tentang pelegalan pernikahan sesama jenis di tahun 2008, namun, seiring berjalannya waktu, Obama merubah pola pikirnya terhadap pernikahan sesama jenis dan mendukungnya (The Washington Post, 2016). Kemudian, Obama juga menginstruksikan kepada kabinetnya untuk mengimplementasikan aturan-aturan tentang pernikahan sesama jenis. Obama memastikan bahwa keputusan tersebut berjalan dengan lancar dan memastikan bahwa pemerintah federal mengakui hak-hak bagi pasangan-pasangan sesama jenis (Office of the Press Secretary, 2016).